

KETERKAITAN PENERIMAAN DAERAH DAN PDRB PROPINSI JAMBI (PENDEKATAN SIMULTAN)

Selamet Rahmadi

Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Jambi,
Kampus Pinang Masak

ABSTRACT

Sumber penerimaan PAD, pajak, retribusi, BUMD, penerimaan lain yang sah, BHPBP dan penerimaan daerah lainnya berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB sedangkan dana perimbangan, DAU dan DAK berpengaruh negatif terhadap PDRB dengan korelasi rendah dan koefisien determinasi kecil. PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, pajak, retribusi, BUMD, penerimaan lain yang sah, BHPBP, penerimaan daerah lainnya, dana perimbangan, DAU dan terhadap DAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan dengan korelasi

Kata-Kata Kunci : *Penerimaan Daerah, PDRB kuat/tinggi dan koefisien determinasi besar*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan sebagai suatu proses yang menghendaki terjadinya perubahan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik sosial maupun ekonomi akan tercapai jika dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Pemberian otonomi pada daerah paling tidak dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan tersebut. Pemberian otonomi pada daerah pada prinsipnya terkandung beberapa tujuan pokok yaitu : 1). mampu memberikan peningkatan terhadap kualitas dan kuantitas pelayanan publik, 2). mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 3). mampu menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya dan 4). mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Berdasarkan prinsip pokok yang terkandung dalam otonomi daerah, pemberian otonomi dirasa sejalan dengan tujuan dari pelaksanaan pembangunan yang menghendaki adanya peningkatan pendapatan

perkapita, pertumbuhan ekonomi, mampu mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan atau ketimpangan pembangunan antar daerah. Upaya-upaya kongkrit perlu dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut melalui peningkatan sumber penerimaan daerah, pengembangan dunia usaha daerah, pengembangan sumberdaya manusia dan pengembangan ekonomi masyarakat.

Pesatnya pembangunan di daerah mengharuskan daerah memperbaiki semua aspek yang mendukung pelaksanaan pembangunan. Salah satu aspek perlu diperbaiki terus ditingkatkan adalah aspek keuangan (fiskal). Keuangan sebagai unsur penting dalam mendukung kegiatan pembangunan harus terus dijaga dan ditingkatkan ketersediaannya. Ketersediaan keuangan sebagai sumber pembiayaan akan mempercepat proses kegiatan dan pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan atau direncanakan. Semakin baik atau besar keuangan daerah, maka akan semakin stabil pula kedudukan pemerintah, semakin efektif dalam memberikan pelayanan dalam pembangunan.

II. Tinjauan Pustaka

2.1. Keuangan Daerah

Keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya menyusun APBD. Penghimpunan, penggunaan dan pengelolaan keuangan (fiskal) di daerah dapat tercapai dengan adanya pemberian otonomi pada daerah, dimana daerah diberi wewenang dan tanggung jawab yang besar dalam proses pembangunan. Pemberian otonomi diharapkan dapat menjadi faktor pendorong daerah untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam pengadaan keuangan daerah, sehingga bisa mandiri dalam menyelenggarakan roda pemerintahan maupun dalam melaksanakan pembangunan di daerah. (Rahmadi Dan Setiawati, 2006). Tolak ukur suatu daerah otonom mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, menurut Widjaja (2002) terlihat dari :

- 1). kemampuan struktur organisasinya dalam menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya

- 2). kemampuan aparaturnya dalam menjalankan tugasnya, mengatur dan mengurus rumah tangga daerah,
- 3). kemampuan mendorong partisipasi masyarakat dalam mendorong peran serta rakyat dalam kegiatan pembangunan,
- 4). kemampuan keuangan daerah dalam membiayai semua kegiatan atau tidak melalui pendapatan asli daerah maupun pendapatan lainnya dan digunakan seoptimal mungkin, sehingga dapat mendukung proses pembangunan daerah.

APBD sebagai anggaran yang menjelaskan daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran dan penerimaan negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun. (Suparmoko, 2001). Uraian diatas sejalan dengan apa yang diuraikan Mardiasmo (2002), bahwa anggaran diartikan sebagai suatu rencana yang meliputi bermacam-macam kegiatan dari berbagai tingkatan untuk jangka waktu tertentu dan dinyatakan dengan uang.

2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dari pembangunan nasional mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan daerah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (region) sebagai pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut melalui kenaikan seluruh nilai tambah (value added). Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh nilai tambah yang tercipta juga ditentukan oleh seberapa besar terjadi transfer payment terjadi pada suatu daerah dari daerah lain. (Tarigan, 2005)

III. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan data sekunder (time series) yang meliputi : 1). jumlah penerimaan daerah beserta komponen penerimaannya dan PDRB Propinsi Jambi

Pengukuran dampak penerimaan daerah beserta sumber-sumber penerimaannya terhadap PDRB dan PDRB terhadap penerimaan daerah beserta sumber-sumber penerimaannya di gunakan pendekatan regresi : (Gujarati, 2003) dengan bentuk masing-masing sebagai berikut :

$$1. \text{PDRB} = \beta_0 + \beta_1 \text{Pad} + \beta_2 \text{Paj} + \beta_3 \text{Ret} + \beta_4 \text{Bud} + \beta_5 \text{Lan} + \beta_6 \text{Prm} + \beta_7 \text{Bhp} + \beta_8 \text{Dau} + \beta_9 \text{Dak} + \beta_{10} \text{Pdl} + e$$

$$2. \text{PDJ}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{PDRB} + e$$

Dimana :

PDRB = PDRB Propinsi Jambi atas dasar harga konstan tahun 2000

Pad = Realisasi PAD Propinsi Jambi

Paj = Realisasi penerimaan pajak Propinsi Jambi

Ret = Realisasi penerimaan retribusi Propinsi Jambi

Bud = Realisasi penerimaan BUMD Propinsi Jambi

Lan = Realisasi penerimaan lain-lain sah Propinsi Jambi

Prm = Realisasi penerimaan dana perimbangan Propinsi Jambi
 Bhp = Realisasi penerimaan BHPBP Propinsi Jambi
 Dau = Realisasi penerimaan dana alokasi umum Propinsi Jambi
 Dak = Realisasi penerimaan dana alokasi khusus Propinsi Jambi
 Pdl = Realisasi penerimaan daerah lain-lain yang sah Propinsi Jambi
 PDJ_i = Realisasi penerimaan daerah Propinsi Jambi sumber ke i

IV. Hasil dan Pembahasan

1.1. Dampak Penerimaan Daerah Dan Sumber Penerimaan Daerah Terhadap PDRB

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan data selama kurun waktu tahun 2000 – 2009 diketahui, ternyata sumber-sumber penerimaan daerah di Propinsi Jambi yaitu : PAD, pajak, retribusi, BUMD, penerimaan lain yang sah, BHPBP, dana perimbangan, DAU, DAK dan penerimaan daerah lainnya memiliki nilai koefisien regresi positif dan negatif terhadap PDRB. Variabel yang memiliki koefisien regresi positif terhadap PDRB adalah: PAD ; 0,337, pajak ; 1,070, retribusi ; 1,026, BUMD ; 1,696, penerimaan lain yang sah ; 1,514, BHPBP ; 1,614 dan penerimaan daerah lainnya ; 0,785. Koefisien regresi positif dari tujuh (7) variabel mampu mendorong peningkatan PDRB, tetapi secara tidak langsung

Melalui belanja daerah yang dapat dibiayai oleh sumber penerimaan tersebut. Kemampuan meningkatkan PDRB secara tidak langsung memberi pengaruh kecil terhadap upaya meningkatkan PDRB Propinsi Jambi, karena ketujuh (7) sumber penerimaan daerah pada uji t statistik dan F statistik tidak berpengaruh signifikan pada $\alpha = 5 \%$.

Sementara sumber penerimaan yang memiliki nilai koefisien regresi negatif terhadap PDRB adalah : dana perimbangan ; 1,136, DAU ; -1,088 dan DAK ; -1,542. Koefisien regresi negatif dari tiga (3) variabel sumber penerimaan memberi arti ketiga (3) sumber penerimaan tidak mampu mendorong peningkatan PDRB, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Ketidakmampuan meningkatkan PDRB tersebut membawa pengaruh pada ketidakmampuan meningkatkan PDRB Propinsi Jambi, karena dengan menggunakan uji t dan F statistik ketiga (3) sumber penerimaan daerah tidak berpengaruh signifikan pada $\alpha = 5 \%$. Ketidakmampuan sumber-sumber penerimaan daerah diatas dalam meningkatkan PDRB Propinsi Jambi terlihat juga melalui nilai koefisien korelasi/hubungan sebesar 0,329 atau 32,9 persen dan berhubungan rendah.

Penerimaan daerah Propinsi Jambi memberi pengaruh atau menjelaskan perubahan PDRB Propinsi Jambi sebesar 0,348 atau 37,8 persen atau termasuk katagori rendah.

Tabel.1. Hasil Koefisien Regresi Sumber-Sumber Penerimaan Terhadap PDRB Propinsi Jambi Dampak PAD, Pajak, Retribusi, BUMD, Lain, Perimbangan, BHPBP, DAU, DAK Dan Penerimaan Daerah Lain Terhadap PDRB

Variabel	Koefisien Regresi	t Hitung	F Hitung	Koefisien Korelasi (R)	Koefisien Determinasi (R ²)
Konstanta	1,00E+012	-	421,509	0,329	0,378
PAD	0,337	0,049			
Pajak	1,070	1,429			
Retribusi	1,026	0,964			
BUMD	1,696	1,905			
Lain	1,514	1,679			
Perimbangan	-1,136	-0,761			
BHPBP	1,614	1,809			
DAU	-1,088	-0,721			
DAK	-1,542	-0,743			
Pen.Daerah.Lain	0,875	0,180			

Sumber : data diolah

4.2. Dampak PDRB Terhadap Penerimaan Daerah Dan Sumber Penerimaan Daerah

PDRB Propinsi Jambi setiap tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan PDRB memberi gambaran, bahwa aktivitas kegiatan ekonomi berjalan seperti apa yang diinginkan. Peningkatan yang terjadi tidak lepas dari upaya pemerintah Propinsi menyediakan dana sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Sumber penerimaan dapat meningkat, jika pemerintah mampu menggali potensi sumber penerimaan yang sudah ada ataupun melalui sumber penerimaan yang baru. Upaya menggali potensi sumber penerimaan di daerah Jambi dilakukan dengan memanfaatkan serta menggali potensi yang berasal dari kekayaan sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia. Pemanfaatan dan penggalan potensi tersebut dilakukan melalui upaya peningkatan PAD beserta komponen penerimaannya, peningkatan penerimaan dari dana perimbangan beserta komponen penerimaannya dan penerimaan lain yang sah

Penggalan potensi tersebut dapat terlaksana, jika perekonomian (PDRB) tumbuh stabil atau meningkat. Perekonomian tumbuh tercermin dari semakin besarnya aktivitas ekonomi yang dilakukan dan meningkatnya produktivitas pemerintah dan masyarakat lewat sektor-sektor yang ada. Peningkatan aktivitas serta produktivitas sektor-sektor ekonomi akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan, memperluas kesempatan kerja melalui semakin besarnya lapangan kerja tersedia bagi masyarakat dan semakin meratanya hasil pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat, baik di perdesaan maupun perkotaan serta antar Kabupaten/Kota di Propinsi Jambi. Besarnya dampak peningkatan perekonomian (PDRB) terhadap sumber-sumber penerimaan tersebut dapat dijelaskan dari hasil perhitungan seperti di bawah ini.

1. Dampak PDRB Terhadap PAD

Berdasarkan hasil perhitungan, dampak PDRB terhadap PAD berpengaruh positif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$ dengan koefisien regresi sebesar 0,731. Angka tersebut memberi arti, jika PDRB ditingkatkan maka PAD akan meningkat sebesar 0,731 dikalikan dengan peningkatan PDRB yang diharapkan pemerintah Propinsi Jambi. Pengaruh positif didukung dengan koefisien korelasi positif sebesar 0,992, artinya PDRB memiliki hubungan terhadap PAD sebesar 99,2 persen atau berhubungan kuat/tinggi dan kemampuan PDRB mempengaruhi perubahan PAD sebesar 0,985 atau 98,5 persen.

2. Dampak PDRB Terhadap Pajak

Dampak PDRB terhadap Pajak berpengaruh positif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$ dengan koefisien regresi sebesar 0,635. Angka tersebut memberi arti, jika PDRB ditingkatkan maka Pajak akan meningkat sebesar 0,635 dikalikan dengan peningkatan PDRB yang diharapkan pemerintah Propinsi Jambi.

Pengaruh positif didukung dengan koefisien korelasi positif sebesar 0,989, artinya PDRB memiliki hubungan terhadap pajak sebesar 98,9 persen atau berhubungan kuat/tinggi dan kemampuan PDRB mempengaruhi perubahan pada pajak sebesar 0,979 atau 97,9 persen. Kemampuan PDRB meningkatkan sumber penerimaan pajak tercermin semakin meningkatnya aktivitas dan produktivitas sektor-sektor yang terlibat dalam perekonomian. Penetapan pajak dapat dilakukan melalui pajak bersifat progresif, proporsional dan regresif.

3. Dampak PDRB Terhadap Retribusi

Pengaruh PDRB terhadap retribusi bersifat positif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$ dengan koefisien regresi sebesar 0,045. Angka tersebut memberi arti, jika PDRB ditingkatkan maka retribusi akan meningkat sebesar 0,045 dikalikan dengan peningkatan PDRB yang diharapkan pemerintah Propinsi Jambi.

Pengaruh positif di dukung koefisien korelasi positif sebesar 0,886, artinya PDRB memiliki hubungan terhadap retribusi sebesar 88,6 persen atau berhubungan kuat/tinggi dan kemampuan PDRB mempengaruhi perubahan pada retribusi sebesar 0,786 atau 78,6 persen. Kemampuan PDRB meningkatkan sumber penerimaan retribusi dapat terjadi dengan semakin meningkatnya aktivitas dan produktivitas masyarakat yang menjadi sumber penerimaan retribusi melalui penyediaan sarana dan prasarana yang digunakan publik oleh pemerintah daerah, baik retribusi jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

4.Dampak PDRB Terhadap BUMD

Pengaruh PDRB terhadap BUMD bersifat positif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$ dengan koefisien regresi sebesar 0,009. Angka tersebut memberi arti, jika PDRB ditingkatkan maka BUMD meningkat sebesar 0,009 dikalikan dengan peningkatan PDRB yang diharapkan pemerintah Propinsi Jambi.

Pengaruh positif didukung koefisien korelasi positif sebesar 0,834, artinya PDRB memiliki hubungan terhadap BUMD sebesar 83,6 persen atau berhubungan kuat/tinggi dan kemampuan PDRB mempengaruhi perubahan BUMD sebesar 0,695 atau 69,5 persen. Kemampuan PDRB meningkatkan sumber penerimaan BUMD dapat terjadi dengan semakin meningkatnya aktivitas dan produktivitas sektor-sektor perekonomian yang menggunakan jasa yang disediakan perusahaan milik daerah, seperti lembaga keuangan, perusahaan air minum dan lainnya.

Tabel.2. Hasil Koefisien Regresi PDRB Terhadap Sumber-Sumber Penerimaan Propinsi Jambi

Variabel	Koefisien Regresi	t Hitung	Koefisien Korelasi (R)	Koefisien Determinasi (R ²)
Dampak PDRB Terhadap PAD				
Konstanta	-6,593E+011	-	0,992	0,985
PDRB	0,731	22,634		
Dampak PDRB Terhadap Pajak				
Konstanta	-5,776E+011	-	0,989	0,979
PDRB	0,635	19,346		
Dampak PDRB Terhadap Retribusi				
Konstanta	-3,662E+011	-	0,886	0,786
PDRB	0,045	5,413		
Dampak PDRB Terhadap BUMD				
Konstanta	-7,232E+011	-	0,834	0,695
PDRB	0,009	4,273		
Dampak PDRB Terhadap Penerimaan Lain				
Konstanta	-4,109E+011	-	0,878	0,771
PDRB	0,045	5,195		
Dampak PDRB Terhadap Perimbangan				
Konstanta	-9,473E+011	-	0,979	0,958
PDRB	1,078	13,551		
Dampak PDRB Terhadap BHPBP				
Konstanta	-4,149E011	-	0,962	0,925
PDRB	0,423	9,929		
Dampak PDRB Terhadap DAU				
Konstanta	-5,662E+011	-	0,975	0,951
PDRB	0,670	12,449		
Dampak PDRB Terhadap DAK				
Konstanta	-3,074E+011	-	0,107	0,012
PDRB	-0,013	-0,305		
Dampak PDRB Terhadap Penerimaan Daerah Lain				
Konstanta	-6,908E+011	-	0,830	0,689
PDRB	0,069	4,214		

5.Dampak PDRB Terhadap Penerimaan Lain

PDRB berpengaruh positif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$ terhadap penerimaan lain yang sah dengan koefisien regresi 0,045. Angka koefisien regresi memberi arti, jika PDRB ditingkatkan maka penerimaan lain yang sah meningkat sebesar 0,045 dikalikan dengan peningkatan PDRB yang diharapkan pemerintah Propinsi Jambi. Pengaruh positif didukung koefisien korelasi positif sebesar 0,878, artinya PDRB memiliki hubungan terhadap penerimaan lain yang sah sebesar 87,8 persen atau berhubungan kuat/tinggi dan kemampuan PDRB mempengaruhi perubahan penerimaan lain yang sah sebesar 0,771 atau 77,1 persen.

6.Dampak PDRB Terhadap Dana Perimbangan

Angka koefisien regresi PDRB terhadap dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$ dengan nilai sebesar 1,078. Angka tersebut memberi arti, jika PDRB ditingkatkan maka dana perimbangan meningkat sebesar 1,078 dikalikan dengan peningkatan PDRB

yang diharapkan pemerintah Propinsi Jambi. Pengaruh positif didukung koefisien korelasi positif sebesar 0,979, artinya PDRB memiliki hubungan terhadap dana perimbangan sebesar 97,9 persen atau berhubungan kuat/tinggi dan kemampuan PDRB mempengaruhi perubahan penerimaan dana perimbangan sebesar 0,958 atau 95,8 persen.

7.Dampak PDRB Terhadap Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak (BHPBP)

Angka koefisien regresi PDRB berpengaruh positif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$ terhadap bagi hasil pajak dan bukan pajak (BHPBP) dengan nilai sebesar 0,423. Angka tersebut memberi arti, jika PDRB ditingkatkan maka BHPBP meningkat sebesar 0,423 dikalikan dengan peningkatan PDRB yang diharapkan pemerintah Propinsi Jambi. Pengaruh positif didukung koefisien korelasi positif sebesar 0,962, artinya PDRB memiliki hubungan terhadap BHPBP sebesar 96,2 persen atau berhubungan kuat/tinggi dan kemampuan PDRB dalam mempengaruhi perubahan BHPBP sebesar 0,925 atau 92,5 persen.

8.Dampak PDRB Terhadap DAU

DAU dipengaruhi oleh PDRB bersifat positif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$ dengan angka koefisien regresi sebesar 0,670. Angka tersebut memberi arti, jika PDRB ditingkatkan maka DAU meningkat sebesar 0,670 dikalikan dengan peningkatan PDRB yang diharapkan pemerintah Propinsi Jambi. Pengaruh positif didukung dengan angka koefisien korelasi positif sebesar 0,975, artinya PDRB memiliki hubungan terhadap DAU sebesar 97,5 persen atau berhubungan kuat/tinggi. Kemampuan PDRB mempengaruhi perubahan DAU sebesar 0,952 atau 95,2 persen.

9.Dampak PDRB Terhadap DAK

Angka koefisien regresi PDRB terhadap DAK berpengaruh negatif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$ dengan nilai sebesar 0,013. Angka tersebut memberi arti, jika PDRB ditingkatkan maka DAK menurun sebesar 0,013 dikalikan dengan peningkatan PDRB yang diharapkan pemerintah Propinsi Jambi. Pengaruh negatif tersebut didukung angka koefisien korelasi positif sebesar 0,107, artinya PDRB memiliki hubungan terhadap DAK sebesar 10,7 persen

Dan berhubungan sangat rendah. Ketidakmampuan PDRB

mempengaruhi perubahan DAK didukung dengan koefisien determinasi sebesar 0,012 atau 1,2 persen.

10.Dampak PDRB Terhadap Penerimaan Daerah Lainnya

PDRB mampu meningkatkan penerimaan terhadap penerimaan daerah lainnya dengan pengaruh positif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$ dengan angka koefisien regresi sebesar 0,069. Angka tersebut memberi arti, jika PDRB ditingkatkan maka penerimaan daerah lainnya meningkat sebesar 0,069 dikalikan dengan peningkatan PDRB yang diharapkan pemerintah Propinsi Jambi. Pengaruh positif tersebut didukung dengan koefisien korelasi positif sebesar 0,830, artinya PDRB memiliki hubungan terhadap penerimaan daerah lainnya sebesar 83 persen dan berhubungan kuat/tinggi dan kemampuan PDRB dalam mempengaruhi perubahan terhadap penerimaan daerah lainnya sebesar 0,689 atau 68,9 persen.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Sumber penerimaan PAD, pajak, retribusi, BUMD, penerimaan lain yang sah, BHPBP dan penerimaan daerah lainnya berpengaruh positif dan tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$ terhadap PDRB sedangkan dana perimbangan, DAU dan DAK berpengaruh negatif pada $\alpha = 5\%$ terhadap PDRB dengan korelasi rendah dan koefisien determinasi kecil. PDRB memiliki pengaruh positif dan signifikan pada $\alpha = 5\%$ terhadap PAD, pajak, retribusi, BUMD, penerimaan lain yang sah, BHPBP, penerimaan daerah lainnya, dana perimbangan dan DAU kecuali terhadap DAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada $\alpha = 5\%$ dengan korelasi kuat/tinggi dan koefisien determinasi besar.

5.2. Saran

Peningkatan sumber penerimaan daerah Propinsi Jambi tidak berpengaruh secara signifikan secara langsung terhadap PDRB, untuk itu dimasa datang sumber penerimaan Propinsi Jambi dapat ditingkatkan melalui peningkatan PDRB melalui peningkatan belanja daerah dan mengalokasikan dana secara adil, merata dan mendasarkan diri pada skala prioritas pada masing-masing sektor dalam perekonomian, khususnya sektor produktif yang nantinya dapat meningkatkan sumber - sumber penerimaan Propinsi Jambi melalui peningkatan aktivitas serta produktivitas kegiatan ekonomi masyarakat dan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln*, 1997, *Ekonomi Pembangunan*, Penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Djamin, Zulkarnain*, 1993, *Perekonomian Indonesia*, FE UI Jakarta.
- Dumairy*, 1997, *Perekonomian Indonesia*, Penerbit Erlangga Jakarta.
- Gujarati, Damodar. N.*, 2003, *Basic Econometrics*, Edisi keempat, Mc Graw-Hill International Editions.
- Koncoro. M.*, 2004, *Otonomi Dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi Dan Peluang*, Erlangga, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar*, 1997, *Administrasi Pembangunan, Perkembangan, Pemikiran dan Prakteknya*, LP3ES, Jakarta
- Mahi, Raksaka*, 2005, *Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, Vol.VI NO.1. Juli.
- Mardiasmo*, 2002, *Otonomi Dan Keuangan Daerah*, BP FE-UGM, Yogyakarta.
- Rahmadi, Selamat Dan Yuliusman*, 2006, *Multiplier Pengeluaran Pemerintah Propinsi Jambi*, Jurnal Manajemen Dan Pembangunan, Vol. 5 No.1 Januari – Juni 2006, FE UNJA.
- Rahmadi, Selamat Dan Setiawati, Rike*, 2006, *Evaluasi Porsi Belanja Rutin Dan Belanja Pembangunan Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Batanghari*, Jurnal Manajemen Dan Pembangunan, Vol. 5 No.3 September- Desember 2006, FE UNJA.
- Richardson, W. Harry*, 2001, *Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional*, Edisi Revisi, LPFE UI, Jakarta.
- Suparmoko, M.*, 2001, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Edisi Pertama, Yogyakarta.
- Tarigan, M.R.P, Robinson*, 2005, *Ekonomi Regional : Teori Dan Aplikasi*, Edisi Revisi, Bumi Aksara, Jakarta.
- Tambunan, Tulus*, 2001, *Perekonomian Indonesia : Teori Dan Temuan Empiris*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Widjaja, HAW*, 2002, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta